

Pengaruh Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Penggunaan SIPD – RI terhadap Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Salsa Bila Nur Aini¹ Sintia Nurlitasari² Terrensia Sekar Pamastutiningtyas³

Universitas Muhammadiyah Karanganyar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) terhadap efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (literature review) dengan menelaah berbagai jurnal, laporan penelitian, dan artikel ilmiah terkait implementasi SIPD serta kompetensi SDM dalam tata kelola keuangan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan SIPD-RI sangat ditentukan oleh kemampuan teknis, literasi digital, pemahaman regulasi, serta dukungan organisasi terhadap pegawai sebagai operator sistem. Berbagai penelitian terdahulu menegaskan bahwa SIPD dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, namun efektivitas tersebut hanya dapat dicapai apabila didukung oleh SDM yang kompeten dan siap beradaptasi dengan transformasi digital. Dengan demikian, kombinasi antara kesiapan sumber daya manusia dan optimalisasi penggunaan SIPD-RI menjadi faktor krusial dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Kata kunci: *Kesiapan Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah.*

Copyright (c) 2025

PENDAHULUAN

Dalam tata kelola pemerintahan kontemporer yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sangat penting untuk memaksimalkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap kinerja keuangan. Dalam situasi ini, dianggap bahwa pelaksanaan SIPD dapat membantu pemerintah daerah membuat pelaporan keuangan yang lebih akurat, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan mengurangi kemungkinan penyimpangan anggaran. Selain itu, evaluasi telah dilakukan tentang seberapa efektif SIPD dapat meningkatkan keamanan data keuangan, yang memudahkan proses audit dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah secara objektif. Menurut Christina Irwati Tanan dan Maikel Walilo: Minterlin Tresya Kenangalem, 2025, SIPD berfungsi sebagai sistem informasi terintegrasi. Penting dalam menunjang pengelolaan keuangan publik, khususnya dalam meminimalisasi terjadinya kesalahan administrasi serta mempercepat proses usaha keuangan lokal. Di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Dea Ayu Puspitasari (2021)

menemukan bahwa adopsi SIPD meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian (Djamil Hasim et al., 2023), optimalisasi SIPD pada lembaga pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ini berarti bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih jelas. Oleh karena itu, SIPD dapat dianggap sebagai komponen penting dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

Meskipun manfaat SIPD telah diidentifikasi secara teoritis, ada banyak tantangan di lapangan untuk mencapai implementasi yang ideal untuk meningkatkan kinerja keuangan. Kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya mampu memaksimalkan fitur dan fungsi SIPD. Dalam penelitian mereka di Kota Bekasi, Firdaus dan Cholik 2024 menemukan bahwa kesiapan organisasi, tingkat literasi digital pegawai, dan komitmen manajemen terhadap pengelolaan keuangan berbasis teknologi digital sangat memengaruhi keberhasilan penerapan SIPD. Selanjutnya (Maulani et al., 2024) mengatakan bahwa SIPD dapat menjadi alat penting untuk mendukung pengawasan internal dan eksternal dengan melakukan inovasi teknologi. Namun, mereka sering menghadapi tantangan perubahan yang berasal dari budaya kerja birokrasi konvensional. Menurut penelitian (Indriyani et al., 2023), transformasi digital memerlukan perubahan peran dan peningkatan kemampuan pegawai untuk optimalisasi pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan SIPD terhadap kinerja keuangan bergantung pada seberapa baik sistem itu sendiri, tetapi juga seberapa siap sumber daya manusia dan budaya organisasi untuk perubahan. Dengan demikian, tujuan utama peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dicapai.

Dari riset gap yang dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini akan membahas mengenai kendala dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemanfaatan SIPD lebih efektif dalam mendukung kinerja keuangan daerah.

Tinjauan Literatur

Efektivitas Keuangan Pemerintahan Daerah

Efektivitas keuangan pemerintah daerah mencerminkan sejauh mana pengelolaan keuangan publik efektif dan efisien dalam mendukung tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur kunci dalam menilai pencapaian pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah wajib menyusun informasi keuangan yang berkualitas tinggi. Informasi ini harus mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan relevan, dengan proses penyusunan yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma dan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Setiagama et al., 2024).

Mengumpulkan, memelihara, dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah tugas sistem informasi keuangan

daerah. Sistem ini kemudian mengolah data tersebut menjadi informasi yang dapat diakses publik untuk mendukung transparansi, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan yang akuntabel. Menurut Jamil Hasim et al., 2023. Konsep Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Menurut Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah didefinisikan sebagai suatu rangkaian sistematis yang terdiri dari prosedur, penyelenggara, alat, dan komponen lain yang digunakan untuk menjalankan kegiatan akuntansi, mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan pada organisasi pemerintah. Oleh karena itu, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah juga merupakan rangkaian prosedur dan komponen yang sama seperti Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah kumpulan aktor, prosedur, alat, dan komponen yang sistematis yang digunakan untuk melakukan tugas akuntansi, mulai dari menilai transaksi hingga membuat laporan keuangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah mengacu pada definisi ini. Peraturan ini dibuat untuk memastikan pengelolaan akuntansi yang terstruktur sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan daerah (Wardhana et al., 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD yang optimal membutuhkan dukungan dari SDM yang kompeten. (Christina Irwati Tanan;Maikel Walilo: Minterlin Tresya Kenangalem, 2025) menegaskan bahwa peran SIPD dalam meningkatkan kinerja keuangan tidak akan berjalan efektif tanpa kesiapan dan kemampuan aparatur dalam mengelola sistem tersebut. Menurut (Tri Utami, 2025) digitalisasi pemerintahan melalui penerapan sistem informasi mampu menciptakan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola publik, asalkan didukung dengan peningkatan kapasitas dan literasi digital aparatur daerah. Lebih lanjut, (Publicuho et al., 2025) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan sistem digital seperti SIPD secara optimal, baik dalam aspek teknis maupun manajerial.

Digitalisasi Sistem Informasi Daerah (SIPD)

Digitalisasi sistem informasi pemerintahan daerah merupakan proses transformasi administrasi dan layanan publik yang sebelumnya manual menjadi sistem terpadu berbasis teknologi informasi. Transformasi ini menjadi fondasi utama terwujudnya tata kelola berbasis data, di mana pengambilan keputusan didasarkan pada data yang akurat, tersedia secara real-time, dan mudah diakses oleh seluruh pihak terkait.

Tujuan penyelenggaraan SIPD adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat daerah. Penggunaan SIPD telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi, yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Penggunaan teknologi ini telah meningkat pesat, yang telah berdampak besar pada banyak industri, termasuk sektor ketenagakerjaan. Ini telah meningkatkan produktivitas, memudahkan pelaksanaan tugas, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan kemajuan dalam artikel ini (Maulani et al., 2024).

Upaya besar diperlukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan khusus, meningkatkan infrastruktur teknologi, dan menyesuaikan prosedur operasional agar lebih fleksibel dan dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sasaran dari SIPD adalah untuk meningkatkan pemanfaatan data untuk membantu pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan ini, pihak-pihak terkait harus dapat mengakses data secara bebas. SIPD meningkatkan layanan internal pemerintah dan menyederhanakan manajemen administrasi. Sebagai contoh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura terus bekerja untuk membangun sistem informasi yang akan membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Christina Irwati Tanan dan Maikel Walilo akan bekerja sama untuk membuat buku Minterlin Tresya Kenangalem pada tahun 2025.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam penelitian tentang sejauh mana digitalisasi sistem informasi benar-benar berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah dan efektivitas tata kelola. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada evaluasi teknis dan tingkat adopsi sistem, sementara penelitian yang lebih baru menganalisis secara menyeluruh dampak digitalisasi sistem informasi terhadap efisiensi operasional, peningkatan akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan masi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Penggunaan SIPD

Sumber daya manusia (SDM) yang mengelola SIPD sangat penting untuk kualitas implementasinya. Kemampuan teknis dan pemahaman sistem informasi akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan proses digitalisasi pemerintahan. (Djamil Hasim et al., 2023)

(Indriyani et al., 2023) menjelaskan bahwa perubahan digital organisasi mengubah peran dan keterampilan pegawai, menuntut kemampuan baru seperti literasi digital, analisis data, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Dalam konteks pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem informasi.

Bahwa manajemen kinerja digital perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan, supervisi, dan evaluasi kinerja berbasis digital agar dapat menghasilkan tata kelola yang efisien dan terukur.

METODOLOGI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kesiapan sumber daya manusia terhadap penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menghimpun dan meninjau berbagai literatur yang relevan, seperti lap penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi artikel-artikel ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi tema, kesesuaian variabel penelitian, serta periode publikasi. Dari proses tersebut, diperoleh sebanyak 35 jurnal yang dianalisis secara sistematis, yang terdiri atas 28 jurnal dengan temuan positif dan 7 jurnal dengan temuan negatif terkait pengaruh kesiapan sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara efektif melalui pemanfaatan SIPD. Artikel-artikel yang terpilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan hasil penelitian, konteks daerah, serta aspek kesiapan sumber daya manusia yang diteliti.

Data dipelajari melalui metode analisis kualitatif deskriptif. dengan cara membandingkan, menginterpretasikan, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai penelitian yang telah direview. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta perbedaan hasil penelitian terkait kesiapan sumber daya manusia dalam implementasi SIPD. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai sejauh mana kesiapan sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat optimalisasi penerapan SIPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan hasil literature review terhadap 35 artikel ilmiah, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) memberikan dampak yang positif. Sebanyak 28 artikel mengungkapkan bahwa aparatur yang memiliki pemahaman sistem dan kemampuan teknis yang memadai mampu mendukung penerapan SIPD secara efektif. Dampak positif tersebut tercermin pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menjadi lebih tepat waktu, transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, implementasi SIPD dinilai berperan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih terintegrasi dan berbasis sistem informasi. Namun demikian, sebagian kecil penelitian, yakni 7 artikel, menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia dalam penggunaan SIPD belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal terhadap kinerja keuangan daerah. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi aparatur, tingkat literasi digital yang belum merata, serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan SIPD yang masih perlu ditingkatkan. Faktor teknis seperti stabilitas sistem aplikasi juga turut memengaruhi efektivitas implementasi di beberapa pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan pentingnya upaya berkelanjutan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penyempurnaan sistem agar manfaat SIPD dapat dirasakan secara maksimal.

PEMBAHASAN

Menurut peninjauan literatur terhadap 28 artikel yang menghasilkan hasil yang positif, sebagian besar penelitian menemukan bahwa kesiapan sumber daya manusia, yang mencakup kompetensi teknis, pemahaman regulasi keuangan daerah, pengalaman kerja, dan tingkat pelatihan, memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa efektif kinerja keuangan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI). Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup cenderung lebih fleksibel dalam menjalankan sistem, meminimalkan kesalahan input data, dan memaksimalkan fitur SIPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Studi menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang lebih baik dipengaruhi langsung oleh kesiapan sumber daya manusia, khususnya dalam hal kompetensi dan literasi digital. Penggunaan SIPD yang optimal oleh sumber daya manusia yang siap membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik dengan menyediakan informasi keuangan yang lebih tepat waktu, akurat, dan terintegrasi. Selain itu, penggunaan SIPD oleh sumber daya manusia yang siap juga membantu pemerintah daerah memenuhi standar akuntansi pemerintahan serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi kinerja keuangan daerah (Puspitasari, 2021; Hasim et al., 2023; Tanan et al., 2025). Oleh karena itu, kesiapan sumber daya manusia adalah bagian strategis dari penerapan tata kelola keuangan daerah yang efektif, bukan hanya sebagai komponen pendukung.

Lebih lanjut, artikel-artikel dengan hasil positif mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sistem informasi, melainkan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia sebagai pengguna utama sistem. SIPD yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas tinggi terbukti mampu meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mempercepat proses audit dan evaluasi kinerja keuangan daerah. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia berfungsi sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara implementasi SIPD dan kinerja keuangan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel mediasi. Temuan ini sejalan dengan teori sistem informasi dan e-government yang menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor publik sangat ditentukan oleh kesiapan organisasi, kemampuan pengguna, serta dukungan manajerial dalam mengoperasikan sistem secara efektif dan berkelanjutan (Indriyani et al., 2023; Maulani et al., 2024; Firdaus & Cholikh, 2024).

Di sisi lain, hasil literature review terhadap 7 artikel dengan temuan negatif menunjukkan bahwa implementasi SIPD belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Beberapa penelitian, seperti studi pada BPKAD Kota Denpasar, Kota Bekasi, dan BPKAD Biak

Numfor, mengungkapkan bahwa rendahnya kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pemanfaatan SIPD. Keterbatasan kompetensi teknis sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, dan kurangnya dukungan infrastruktur teknologi informasi menyebabkan SIPD belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, seringnya gangguan sistem, kurangnya integrasi data, serta ketergantungan terhadap bantuan teknis dari pemerintah pusat turut memperlambat proses pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPD.

Lebih lanjut, beberapa penelitian juga menyoroti adanya resistensi terhadap perubahan dan budaya birokrasi yang masih bersifat konvensional, sehingga sumber daya manusia cenderung belum sepenuhnya beralih dari sistem manual ke sistem digital. Lambatnya respon pemerintah pusat dalam menangani permasalahan teknis SIPD juga menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah daerah. Akibatnya, meskipun SIPD telah diterapkan secara formal, sistem tersebut belum mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan dampak SIPD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, dan dukungan kebijakan dan teknis yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis, pengetahuan tentang regulasi keuangan daerah, literasi digital, dan dukungan yang baik adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Namun demikian, sebagian kecil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah akibat rendahnya kesiapan sumber daya manusia dan keterbatasan dukungan teknis. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kompetensi, minimnya pelatihan dan pendampingan, lemahnya infrastruktur teknologi informasi, serta permasalahan stabilitas dan integrasi sistem. Oleh karena itu, jelas bahwa keberhasilan SIPD tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem informasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan pemerintah yang berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan, langkah strategis termasuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan memperbaiki tata kelola implementasi SIPD.

Referensi :

- Christina Irwati Tanan;Maikel Walilo: Minterlin Tresya Kenangalem. (2025). *Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam*. 8, 15–22.
- Dhea Ayu Puspitasari, H. M. (2021). *ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA YOGYAKARTA*. 3(1), 167–186.
- Djamil Hasim, Yanes Mirino, & Rijal. (2023). Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 669–683. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i4.3459>
- Firdaus, Y. F. H., & Cholik, M. A. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi. *Reformasi Administrasi*, 11(1), 68–78. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i1.4073>
- Indriyani, R., Maulidah, R., Firmannsyah, A., Wandagu, N. A., & Isa Anshori, M. (2023). Digital Organizational Transformation and Employees: How the company's shift towards digital impacts the roles and skills of employees. *Journal of Management Specialist*, 1(2), 71–80. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/JMSINSTITERCOMPUBLISHER><https://journal.institercom-edu.org/index.php/>
- Maulani, A., Anshori, M. I., & Andriani, N. (2024). Inovasi Teknologi dalam Pemerintahan: Implementasi SIPD sebagai Alat untuk Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1415–1422. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3451>
- Publicuho, J., Sion, H., Terbuka, U., Barat, K., & Tengah, K. (2025). *Keuangan Di Kabupaten Kotawaringin Barat*. 8(1), 471–492.
- Setiagama, D., Astikawati, Y., & Pelipa, E. D. wati. (2024). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Sintang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 9(3). <https://doi.org/10.31932/jpe.v9i3.3674>
- Sohidin, Witurachmi, S., & Ariyanto, J. (2010). Rancangan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Guna Meningkatkan Good Governance dan Tata Pelaporan Yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Sektor Publik (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Sukuharjo. *Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 281–306.
- Tri Utami, A. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Melalui Digitalisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi di Jember. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4214>
- Wardhana, M. F., Ryketeng, M., & Husni, M. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer dan Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah terhadap Kualitas LKPD. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 3(1). <https://doi.org/10.37531/bijak.v3i1.1778>
- Bukit, R., & Abubakar, E. (2017). *THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES COMPETENCY AND THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT WITH REGIONAL ACCOUNTING SYSTEM AS AN INTERVENING*. 95(20).
- Daud, N., Blongkod, H., & Yusuf, N. (2025). *The Effect of the Implementation of Local Government Information Systems (SIPD) and Human Resources on Regional Financial Management Accountability*. 3(1), 51–59.
- Hardianti, S., Dewi, R. S., Fauzi, I., Wirananda, H. A., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Muslim, U., & Al, N. (2025). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Subulussalam*. September.
- Moh Machith Masrufi, Harun Blongkod, A. L. (2025). *PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*. 6(2), 11–20.

- Naida, N. (2024). *Optimalisasi SIPD dan SPIP dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan : Pentingnya Kompetensi SDM*. 22(4), 465–479. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i4.10554>
- Napitupulu, D. L., Bancin, M. R. H., & Lubis, T. A. (2024). *Proceeding 2 nd Medan International Economics and Business IMPLEMENTATION AND EFFECTIVENESS OF LOCAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEMS (SIPD) IN INDONESIA : A LITERATURE STUDY* *Proceeding 2 nd Medan International Economics and Business*. 2(1), 1901–1919.
- Natalima, G., Erwin, K., & Bukit, R. B. (2025). *Factors Affecting the Performance of Users of the Regional Government Information System (SIPD) in the Regional Government of Tapanuli Utara Regency*. 12(February), 295–304.
- Siregar, E., Sam, I., & Tiswiyanti, W. (2025). *The Influence of the Implementation of Local Government Information Systems , Human Resources , and Internal Control on the Qualitative Characteristics of Jambi City Government Financial Reports*. 4(2), 461–476.
- Sri Asyrafil Mustaqmah, D. P. P. (2022). *PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI*. VIII(1), 181–197.